

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Konstruksi Sosial atas Realitas**

###### **a. Latar Belakang Teori Konstruksi**

Konstruksionisme sendiri merupakan cikal bakal yang berasal dari aliran filsafat. Ide konstruksionis dimulai oleh Giambatista Vico, seorang epistemolog dari Italia. Aristoteles dalam Bertens mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta (Bungin, 2010:13).

Konstruksionisme menjelaskan bahwa konstruksionis merupakan proses kerja kognitif individu di mana terjadi relasi sosial antara individu dengan orang atau lingkungannya. Proses inilah yang menafsirkan realitas yang ada. Realitas tersebut dibentuk sendiri oleh pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya oleh masing-masing individu. Piaget menyebut kemampuan ini sebagai skema atau skemata dalam yang berarti suatu struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya (Suparno, 2007:30).

Berbeda dengan kaum positivis yang cenderung mengabaikan individu dan hanya terpaku pada struktur sosial, kaum konstruksionis

memilih ke arah teori-teori beraliran interpretatif atau humanistik. Teori-teori humanistik ini cenderung berada di tengah, antara positivis dan kritis. Oleh karenanya, konstruksionisme sebagai bagian dari teori humanistik menganggap individu yang berinteraksi sebagai alat analisa yang tepat. Baginya, realitas sosial memang sudah ada dengan sendirinya namun juga tergantung pada manusia sebagai subjeknya. Pembahasan tersebut yang menjadi bahasan Berger pada teori konstruksi realitas atas realitanya. Berger berpendapat bahwa realitas sosial secara objektif memang ada tetapi maknanya berasal dari dan oleh hubungan subjektif (individu) dengan dunia objektif (Poloma, 2013:299).

#### **b. Teori Konstruksi Sosial atas Realitas Berger dan Luckmann**

Peter Ledwig Berger merupakan sosiolog asal Amerika yang mengambil benang merah antara aliran Emil Durkheim (1858-1917), Max Weber (1864-1920), dan Karl Marx (1818-1883). Berger memiliki pandangan sendiri dalam menyikapi pertarungan aliran positivis Durkheim, humanis Weber, dan juga teori kritik Marx. Berger mengambil sikap tegas bahwa sosiologi merupakan suatu disiplin yang humanistik (Poloma, 2013:298).

Namun dalam perspektifnya, Berger menekuni makna yang menghasilkan watak ganda masyarakat, yakni masyarakat sebagai kenyataan subjektif seperti pandangan Weber dan masyarakat sebagai kenyataan obyektif menurut Durkheim yang terus berdialektika (Marx). Perspektif Berger mendapat sumbangan besar dari Alfred Schutz (1899-

1959) tentang makna dan pembentukan makna atau bagaimana makna membentuk struktur sosial (Poloma, 2013:299). Schutz mengatakan tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti (Ritzer, 2007:59).

Gagasan Berger dan Luckmann bertumpu pada makna realitas dan pengetahuan. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia (yang kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan). Pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik (Poloma, 2013:1).

Keterkaitan hubungan individu dan dunia sosiokulturalnya disusun dalam gagasan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiganya ini merupakan proses dialektika antara individu dengan masyarakatnya atau masyarakat dengan individu. Eksternalisasi dan objektivasi merupakan proses dimana masyarakat merupakan realitas objektif, sedangkan proses internalisasi menempatkan masyarakat sebagai realitas subjektif.

# 1) Manusia sebagai realitas objektif

## a) Eksternalisasi

Berger mendefinisikan eksternalisasi sebagai proses penyesuaian diri individu terhadap dunia sosiokulturalnya (Bungin, 2010:15). Eksternalisasi dipengaruhi secara aktif maupun pasif oleh

akumulasi *common sense* yang merupakan pengetahuan yang dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam kegiatan rutin yang normal, dan sudah jelas dengan sendirinya, dalam kehidupan sehari-hari (Berger & Luckmann, 2012:34).

Pengetahuan bersama ini pada dasarnya bersifat subyektif yang kemudian terjadi berulang-ulang lalu mengendap sehingga menjadi akumulasi *common sense* yang terhabitualisasi. Habitualisasi ini selanjutnya membentuk produk sosial yang nantinya akan diwariskan. Dengan kata lain, manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi (Poloma, 2013:302).

#### b) Objektivasi

Objektivasi tahap pertama disebut sebagai institusionalisasi dan kedua merupakan legitimasi (Riyanto, 2012:117). Institusi adalah jawaban manusia terhadap kehidupannya yang terus mengalir dengan tidak pasti (Riyanto, 2012:109-110). Ketidakpastian ini yang dimaksud Berger sebagai kekacauan yang diliputi kehampaan makna. Institusi, dengan segala ketentuan yang mengatur peran anggotanya, berfungsi untuk memberikan rasa keteraturan dan kenyamanan kepada anggotanya tersebut (Poloma, 2013:303).

Institusi yang diwariskan ini tidak bersifat statis atau tanpa perubahan. Karena dari zaman ke zaman, anggota baru dari institusi tersebut akan terus bisa mempertanyakan institusi tersebut. Untuk

mempertahankannya dibutuhkan legitimasi yang merupakan tahap objektivasi tahap kedua. Legitimasi meletakkan justifikasi kognitif atau penjelasan berdasarkan pembuktian logis mengenai relevansi dari sebuah institusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyoal institusi tersebut, saat institusi itu mulai dirasa kurang atau tidak relevan dalam menjawab persoalan-persoalan yang timbul (Riyanto, 2012:116).

Dengan demikian masyarakat sebagai realitas subjektif dari kedua proses di atas (eksternalisasi dan objektivasi) dapat diterangkan sebagai berikut: Dalam proses eksternalisasi, mula-mula sekelompok manusia menjalankan sejumlah tindakan. Bila tindakan-tindakan tersebut dirasa tepat dan berhasil menyelesaikan persoalan mereka bersama pada saat itu, maka tindakan tersebut akan diulang-ulang. Setelah tindakan itu mengalami pengulangan yang konsisten, kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya. Inilah tahapan objektivasi di mana sebuah institusi menjadi realitas yang objektif setelah melalui proses ini (Riyanto, 2012:110-111).

## 2) Manusia sebagai realitas subjektif (internalisasi)

Masyarakat sebagai kenyataan subyektif menyiratkan bahwa realitas obyektif ditafsiri secara subyektif oleh individu. Dalam proses menafsiri itulah berlangsung internalisasi. Internalisasi yang berlangsung melibatkan sosialisasi, baik primer maupun sekunder.

Menurut Eriyanto (2012:15) bahwa internalisasi itu di antaranya berwujud dalam sosialisasi yakni bagaimana satu generasi menyampaikan nilai-nilai budaya yang ada pada generasi berikut. Generasi berikut diajar untuk hidup sesuai dengan nilai budaya yang mewarnai struktur masyarakatnya. Generasi baru dibentuk oleh makna-makna yang sudah diobjektivasi, mengidentifikasi diri dengannya. Tetapi tidak memilikinya dengan sekadar mengenalnya, ia juga mengungkapkannya.

Sosialisasi primer berlangsung pada masa anak-anak dengan hubungan emosional yang tinggi yang pada akhirnya tidak hanya menimbulkan proses belajar mengenal lingkungan secara kognitif saja. Sedangkan sosialisasi sekunder menurut Berger dan Luckmann dikatakan bahwa, tanpa mempertimbangkan dimensi lainnya, bisa dikatakan bahwa sosialisasi sekunder adalah proses memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan perannya (*role-specific knowledge*), di mana peran-peran secara langsung atau tidak langsung berakar dalam pembagian kerja (Bungin, 2010:21).

Ketiga proses atau tahapan di atas (eksternalisasi, objektivasi, internalisasi) merupakan realitas yang dimaksud Berger dan Luckmann. Realitas objektif yang merupakan realitas yang terbentuk dari pengalaman di luar individu dan dianggap kenyataan ini adalah eksternalisasi. Ekspresi dari realitas objektif dalam berbagai bentuk simbolis tersebut dinamakan objektivasi. Sedangkan proses penyerapan kembali realitas objektif dan

simbolik melalui proses internalisasi menghasilkan realitas yang disebut dengan realitas subjektif.

Dalam realitas subjektif, realitas tersebut menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antara individu dengan objek. Setiap individu mempunyai latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbeda-beda, yang bisa jadi menghasilkan penafsiran yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan objek. Sebaliknya, realitas itu juga mempunyai dimensi objektif (sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, berada di luar) atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita tiadakan dengan angan-angan yang ada, dan sebagainya (Eriyanto, 2012:16).

## **2. Pidato**

### **a. Pengertian Pidato**

Pidato adalah penyajian lisan kepada suatu kelompok massa (Keraf, 2004:314). Pidato merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau dari gagasan pembicara kepada khalayak ramai. Seseorang yang berpidato dengan baik akan mampu meyakinkan pendengarnya untuk menerima dan mematuhi pikiran, informasi, gagasan, atau pesan yang disampaikan (Tang dkk., 2008:157).

Berpidato adalah menyampaikan dan menanamkan pikiran, informasi atau gagasan dari pembicara kepada khalayak ramai dan bermaksud meyakinkan pendengarnya (Arsjad dan Mukti, 2008:53). Pidato umumnya ditujukan kepada orang atau sekumpulan orang untuk

menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar dan lain sebagainya (Karomani, 2011:12).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan rangkaian kata sistematis untuk mengemukakan pikiran atau gagasan kepada khalayak agar dapat mereka mengetahui tentang sesuatu hal.

#### **b. Tujuan Pidato**

Menurut Ochs dan Winner dalam Tarigan (2008:16) bahwa pidato memiliki empat tujuan penyajian yaitu:

- 1) Menyampaikan informasi (*informative*) yaitu pidato yang bertujuan memberikan laporan atau pengetahuan atau sesuatu yang menarik untuk pendengar. Contoh: pidato penyuluhan cara pemakaian kompor gas.
- 2) Meyakinkan dan mempengaruhi sikap pendengar (*persuasive*) yaitu pidato yang berisi tentang usaha untuk mendorong, meyakinkan dan mengajak pendengar untuk melakukan suatu hal. Contoh: pidato calon legislatif.
- 3) Menghibur pendengar (*rekreatif*) yaitu pidato yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan pendengar. Contoh: pidato di posko bencana, pidato dalam acara bakti sosial.
- 4) Menekankan aspek-aspek pendidikan (*educative*) yaitu pidato yang berupaya menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Contoh: pidato keagamaan.



### **c. Kriteria Pidato yang Baik**

Seseorang yang berpidato dengan baik akan meyakinkan pendengarnya untuk menerima dan mematuhi pikiran, informasi, gagasan atau pesan yang disampaikannya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan agar dapat berpidato dengan baik menurut Maidar dalam Karomani (2011:12) adalah:

- 1) Harus mempunyai tekad dan keyakinan bahwa pembicara mampu meyakinkan orang lain. Dengan memiliki tekad ini maka akan tumbuh keberanian dan sikap percaya diri sehingga pembicara tidak akan ragu-ragu mengucapkan pidatonya.
- 2) Harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga pembicara dapat menguasai materi dengan baik.
- 3) Harus memiliki pembendaharaan kata yang cukup, sehingga pembicara mampu mengungkapkan pidato dengan lancar dan meyakinkan.
- 4) Harus memiliki kebiasaan atau latihan yang intensif. Persiapan yang matang dan latihan yang intensif akan sangat membantu kelancaran berpidato.

### **d. Pidato Sebagai Alat Propaganda**

Pidato tak lepas dari unsur bahasa politik yang merangkainya yang lazim disebut sebagai propaganda. Bahasa politik adalah bahasa yang digunakan sebagai alat politik, misalnya bahasa-bahasa slogan atau propaganda, bahasa pejabat-pejabat pemerintah dalam berpidato atau bahasa yang digunakan dalam pidato-pidato pemimpin partai dan tulisan-

tulisan yang berbau politik yang tentu saja semua bahasa yang digunakan itu mengandung maksud atau tujuan tertentu (Darma, 2009: 91).

Pidato merupakan media yang dinilai lebih efektif dalam menyebarkan suatu propaganda politik dibanding melalui media massa. Hal ini dikarenakan penyebaran propaganda politik di media massa memiliki keterbatasan *space* dan waktu. Tentu akan sangat berbeda penyajiannya apabila propaganda dilakukan dalam acara pidato atau seminar di lapangan terbuka. Dalam seminar, si orator bisa menjabarkan poin-poin yang ingin dia sampaikan dalam waktu yang agak panjang. Namun di media massa, isinya harus dikemas dalam waktu yang sesingkat mungkin (bahkan bisa jadi kurang dari 30 detik) (Kadriyanti, 2013:9).

Pidato presiden memiliki posisi penting dalam wacana politik. Segala yang dikatakan Presiden lebih mempunyai pengaruh terhadap masyarakat dibandingkan pidato lainnya. Pidato Presiden selalu menunjukkan kebijakan publik, apa yang dikatakan oleh Presiden dianggap sebagai isu yang penting oleh pemerintah. Pidato Presiden juga mempengaruhi bagaimana masyarakat berpikir tentang realitas sosial politik yang ada (Eriyanto, 2012).

### **3. Terorisme**

#### **a. Pengertian Terorisme**

Kata teror berasal dari bahasa Latin “*terrere*” yang kurang lebih diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan (Hakim, 2004:9). Terorisme secara kasar merupakan suatu

istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata terorisme yang artinya dalam keadaan teror (*under the terror*), berasal dari bahasa Latin "terrere" yang berarti gemetaran dan "deterre" yang berarti takut (Abimanyu, 2005:62).

Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme (Manullang, 2001:151).

Pasal 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), menyebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Proses teror menurut Walter (dalam Syafaat, 2003:59) memiliki tiga unsur, yaitu: (1) tindakan atau ancaman kekerasan; (2) reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban, dan (3) dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa teror diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan (Hakim, 2004:9). Adapun pengertian terorisme adalah istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang.

#### **b. Ciri Utama Terorisme**

Terdapat 10 (sepuluh) ciri-ciri utama dari terorisme (Hakim, 2004:11-13), yaitu:

- 1) Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan tujuan tertentu secara sistematis, atau tindakan perorangan maupun kampanye kekerasan yang dirancang untuk menciptakan ketakutan.
- 2) Menggunakan ancaman kekerasan atau melakukan kekerasan tanpa pandang bulu, baik terhadap musuh atau sekutu, untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
- 3) Sengaja ditujukan untuk menciptakan dampak psikologis atau fisik terhadap kelompok masyarakat atau korban tertentu dalam rangka

mengubah sikap dan perilaku politik sesuai dengan maksud dan tujuan pelaku teror.

- 4) Meliputi kaum revolusioner, ekstrimis politik penjahat yang bertujuan politik, dan para lunatik sejati.
- 5) Pelaku dapat beroperasi sendiri ataupun sebagai anggota kelompok yang teroganisir, bahkan pemerintah tertentu.
- 6) Motifnya dapat bersifat pribadi, atau destruksi atas pemerintahan, atau kekuasaan kelompok, sedangkan ambisinya dapat terbatas (lokal) seperti penggulingan rezim tertentu dan global seperti revolusi simultan di seluruh dunia.
- 7) Modusnya berupa penculikan untuk mendapat tebusan, pembajakan, atau pembunuhan kejam yang mungkin tidak dikehendaki oleh para pelakunya. Teroris dapat atau tidak mengharapkan terbunuhnya korban, namun mereka seringkali menemukan saat untuk membunuh guna memperkuat kredibilitas ancaman, walaupun tidak diinginkan untuk membunuh korban.
- 8) Aksi-aksinya dirancang untuk menarik perhatian dunia atas eksistensinya, sehingga korban dan targetnya dapat saja tidak berkaitan sama sekali dengan perjuangan para pelaku.
- 9) Aksi-aksi teror dilakukan karena termotivasi secara politik, atau karena keyakinan kebenaran yang melatarbelakanginya, sehingga cara-cara kekerasan ditempuh untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, aksi-aksi teror pada dasarnya dikategorikan sebagai

tindakan kriminal, ilegal, meresahkan masyarakat dan tidak manusiawi.

- 10) Kegiatan terorisme ditujukan pada suatu pemerintahan, kelompok, kelas, atau partai politik tertentu, dengan tujuan untuk membuat kekacauan di bidang politik, ekonomi, atau sosial.

### c. Kategori Kelompok Teroris

Menurut Adjie S. (2005:16) secara umum terdapat tiga kategori dalam kelompok teroris yang beroperasi di seluruh dunia hingga saat ini, yaitu:

- 1) *Nonstate-supported grup*, adalah kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok yang antiaborsi, antikorupsi, dan lain sebagainya. Dalam aksinya mereka mem-*blow-up* permasalahan tersebut dengan melakukan pembakaran, penyanderaan, ataupun aksi lain yang membahayakan individu atau kepentingan umum.
- 2) *State-sponsored grups*, kelompok ini memperoleh pelatihan, senjata, dan keperluan logistik dan dukungan administrasi dari negara asing, seperti Libya, Syria, Cuba, atau negara blok barat.
- 3) *State-directed grups*, adalah suatu negara yang mengorganisasi dukungan kepada kelompok teroris secara langsung.

#### 4. *Framing*

##### a. Pengertian *Framing*

*Framing* atau bingkai berfungsi untuk menjaga pandangan kita terhadap suatu gambar yang ada. Tuchman dalam salah satu bukunya “*Making News*” menganalogikan *framing* sebagai jendela (Eriyanto, 2012:4). Apa yang ada di luar jendela terlihat dari bagaimana jendela yang kita pakai untuk melihatnya. Jendela yang luas, misalnya, akan memungkinkan kita melihat tidak hanya halaman rumah kita saja, tapi juga rumah-rumah lain atau pemandangan lain yang bisa lebih luas jangkauannya. Berbeda dengan apabila kita menggunakan jendela berukuran kecil yang pada akhirnya sangat membatasi apa yang bisa kita lihat.

Konsep *framing* dalam studi media banyak berasal dari lapangan psikologi dan sosiologi (Eriyanto, 2012:71). Dalam dimensi psikologi, *framing* dilihat dari pengaruh kognisi seseorang yang membentuk skema tentang diri. Skema lahir dari proses pengetahuan dan pengalaman seseorang. Selain itu, lingkungan sosial juga ikut mempengaruhi kehadiran skema. Skema merupakan aktivitas kognitif seseorang dalam melihat dunia sosialnya dengan perspektif tertentu.

Secara psikologis, individu akan cenderung melihat realitas yang kompleks dengan perspektif pribadi (Eriyanto, 2012:72). Kecenderungan ini yang membuat perspektif tentang suatu realitas antarindividu berbeda.

Setiap individu mempunyai perspektif masing-masing yang tidak sama sesuai dengan aktivitas kognisinya.

Untuk itu, skema digunakan untuk menyederhanakan realitas-realitas kompleks yang ditangkap individu tersebut. Penyederhanaan tersebut dilakukan agar pikiran kita mudah mengerti dan memahami suatu realitas (Eriyanto, 2012:86). Skema ini pula bergantung pada pengetahuan dan pengalaman yang dialami individu. Pembentukan makna akan sesuatu bagi anak-anak pastinya berbeda dengan yang sudah dewasa. Oleh karenanya, *framing* dilihat sebagai perspektif yang membatasi pandangan individu terhadap suatu realitas tersebut.

Dengan skema, maka seseorang akan mampu untuk membedakan satu hal dan yang lainnya berdasarkan klasifikasi. Klasifikasi ini merupakan perspektif yang dibuat seseorang untuk memberikan ciri-ciri khusus agar mudah diingat dan membedakannya dengan hal serupa namun tak sama maknanya (Eriyanto, 2012:87).

Selain itu, skema juga membuat kita mengeneralisir suatu hal. Kalau klasifikasi berhubungan dengan bagaimana satu peristiwa atau orang dibedakan dengan ciri-cirinya, generalisasi berhubungan dengan bagaimana satu orang yang mempunyai ciri dan sifat yang berdekatan digeneralisasikan dengan melekatkan pada ciri-ciri yang sama (Eriyanto, 2012:88). Tidak hanya menyederhanakan realitas, mengklasifikasikan, dan mengeneralisir saja, namun skema juga bisa mengasosiasikan peristiwa satu dan yang lainnya. Hal ini yang menyebabkan sesuatu yang sering



dihubung-hubungkan dengan hal lain sehingga memunculkan perspektif yang kadang bias.

Sedangkan dalam dimensi sosiologis, konsep *framing* banyak berasal dari Alfred Schutz, Erwin Goffman, dan juga Peter Berger (Eriyanto, 2012:79-80). Gagasan Schutz tentang manusia sebagai aktor kreatif dalam pemberian makna diartikan bahwa teks berita di media massa awalnya hanya berupa teks biasa tanpa makna, namun, kita sendiri sebagai pembaca yang memberikan makna tersebut (Poloma, 2013:299). Itu pula yang terjadi pada proses peliputan dan penulisan berita oleh wartawan dan pihak redaksi. Peristiwa yang mereka lihat adalah mereka sendiri yang memaknainya.

Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955, yang menjelaskan bahwa mulanya, *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2012:161). Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai kepentingan-kepentingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas oleh media.

Goffman menjelaskan bahwa *strips* adalah urutan aktivitas seseorang dengan *framing* sebagai pola dasar yang mendefinisikan *strips* (Eriyanto, 2012:82). Alat makan, mengambil makanan, kemudian memakannya

merupakan *strips* yang diorganisasikan menjadi satu pola bernama aktivitas makan yang merupakan *frame*. Begitu pula dalam konteks berita. Peristiwa yang ada diruntun dengan bahasa dan simbol yang sedemikian rupa oleh wartawan yang disebut *strips* lalu menjadi satu berita utuh yang merupakan *frame*.

Setiap wacana memiliki struktur internal sendiri di dalamnya. Struktur internal tersebut memiliki sebuah gagasan inti yang kita bahas sekarang, yaitu *framing*. Sebagai suatu metode analisis wacana, framing bertugas menemukan perspektif media dalam wacananya. Perspektif media inilah yang digunakan untuk mengkonstruksi suatu peristiwa. Perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Nugroho dkk, 2009:21).

Dengan *framing*, maka wacana itu bisa dilihat lebih dalam tentang bagaimana pesan diorganisir, digunakan, dan dipahami. Proses *framing* (pembingkai pesan), menurut George J. Aditjondro merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, tetapi dibelokkan secara halus (Siahaan, 2005:9).

*Framing* dipandang sebagai sebuah strategi penyusunan realitas sedemikian rupa, sehingga dihasilkan sebuah wacana (*discourse*) yang di dalam media massa wacana ini paling banyak mengambil bentuk dalam wujud berita. Seperti halnya teori semiotika yang bisa dipakai sebagai wacana teori semiotika, teori *framing* juga bisa dipakai sebagai salah satu

metode untuk memahami “*information strategy*” dari strategi penyusunan realitas, maka analisis *framing* berfungsi untuk membongkar muatan wacana (Hamad, 2014:21-22).

Proses *framing* juga dapat menjadi implikasi politik yang sangat signifikan. *Framing* dapat membentuk rekayasa opini publik tentang suatu kasus. Dengan mempertajam *frame* tertentu tentang sebuah isu politik, mereka dapat mengklaim bahwa opini publik yang berkembang mendukung kepentingan mereka, atau konvergen dengan “klaim kebenaran” mereka (Sudibyo, 2009:188).

Realitas dan peristiwa itu begitu kompleks dan acak, ia harus diidentifikasi (diberi nama, diidentifikasi, dan dihubungkan dengan peristiwa lain yang diketahui oleh khalayak) dan ditempatkan dalam konteks sosial tertentu dimana khalayak tersebut berada (sering kali itu dilakukan dengan menempatkan peristiwa dalam kerangka acuan yang familiar dari khalayak) (Eriyanto, 2012:119). Maka dari itu, efek *framing* yang paling mendasar adalah realitas sosial yang kompleks dan tidak beraturan dibuat sederhana dan beraturan. *Framing* menyediakan alat bagaimana peristiwa dibentuk dan dikemas dalam kategori yang dikenal khalayak. Khalayak bukan disediakan informasi yang rumit, melainkan informasi yang tinggal ambil, kontekstual, berarti bagi dirinya, dan diingat dalam benak mereka.

Beberapa pengertian *framing* yang disampaikan oleh beberapa ahli telah dirangkum dan diringkas oleh Eriyanto (2012:67-68), antara lain:

- 1) Menurut Robert Etman: *framing* adalah proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ia juga menyatakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya.
- 2) Menurut Todd Gitlin: *framing* adalah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
- 3) Menurut David Snow dan Robert Benford: *framing* adalah pemberian makna untuk ditafsirkan peristiwa dari kondisi yang relevan. *Frame* mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, seperti anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi dan kalimat tertentu.
- 4) Menurut Zhongdan dan Pan Konsicki: *framing* didefinisikan sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian-bagian yang lain disamarkan atau bahkan dihilangkan. Aspek yang tidak ditonjolkan

kemudian akan terlupakan oleh khalayak karena khalayak digiring pada satu realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut. *Framing* adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Di tambah pula dengan berbagai kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut (Sobur, 2012:167).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *framing* adalah proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Adapun analisis *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Analisis *framing* dalam penelitian ini menggunakan model *framing* Robert Entman.

#### **b. *Framing* Robert Entman**

*Framing* Robert Entman menjadi model *framing* paling terdepan dengan definisi *framing* yang diberikan Entman dalam *Journal of Communication* Vol. 43 yang ditulisnya, yaitu: “*To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment*

*recommendation*” (Entman, 1993). Artinya bahwa membingkai adalah memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuat mereka lebih menonjol dalam teks komunikasi, sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi pengobatan.

Entman dalam McQuail (2010:380) juga menyebutkan bahwa aspek utama dari sebuah *framing* adalah pendefinisian masalah, penyebab masalah, evaluasi moral, dan solusi penyelesaian masalah. “*According to Entman (1993), ‘Framing involves selection and salience’. He summarizes the main aspects of framing by saying that frames define problems, diagnose causes, make moral judgements, and suggest remedies. It is clear that a very large number of textual devices can be used to perform these activities. They include using certain words or phrases, making certain contextual references, choosing certain pictures or film, giving examples as typical, referring to certain sources and so on*”. Artinya bahwa menurut Entman (1993), ‘*Framing* melibatkan seleksi dan arti-penting’. Dia merangkum aspek utama pembingkai dengan mengatakan bahwa kerangka mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan pengobatan. Jelas bahwa sejumlah besar perangkat tekstual dapat digunakan untuk melakukan aktivitas ini. Mereka termasuk menggunakan kata-kata atau frase tertentu, membuat referensi kontekstual tertentu, memilih gambar atau film tertentu,

memberikan contoh-contoh yang khas, mengacu pada sumber-sumber tertentu dan sebagainya.

Pembahasan utama *framing* dari Entman adalah soal penyeleksian dan penonjolan isu. Aspek penyeleksian isu terjadi oleh pihak redaksi dimana ada pemilihan isu yang nantinya akan disebarakan lewat pemberitaannya atau tulisan di media massanya. Penyeleksian ini meliputi soal pemilihan isu mana yang akan diambil dan mana yang tidak. Tidak semua bisa ditampilkan oleh pihak media, oleh karenanya, isu yang sudah diterima khalayak adalah hasil penyeleksian dari wartawan dan redaksi media tersebut.

*Framing* pada dasarnya adalah penonjolan isu di mana suatu peristiwa ditonjolkan dengan menggunakan aksen-aksen tambahan serta bahasa yang menjadikannya mudah diingat pembaca. Dengan bentuk seperti ini, sebuah ide/gagasan/informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan, karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak (Eriyanto, 2012:186).

Proses *framing* adalah kegiatan yang tak terpisahkan dari pihak media dalam mengkonstruksikan fakta. Bagaimana si wartawan memilih peristiwa yang akan diangkatnya menjadi sebuah berita yang memiliki nilai berita, siapa saja yang ia pilih untuk menjadi narasumbernya, serta bagaimana ia menuliskannya. Tentunya menjadikan berita yang ia tulis menjadi subjektif secara tidak langsung. Tidak hanya wartawan, karena pemilihan angle atau tema atas berita yang ditulis juga menjadi keputusan

rapat redaksi media bersangkutan. Berita yang ditulis wartawan pun nantinya akan kembali disunting oleh editor yang juga sesuai dengan perspektif si editor atas berita tersebut. Redaktur pun memiliki kewenangan dalam memutuskan apakah cerita tersebut layak muat atau tidak. Begitu pula dengan para *layouter* atau tata letak, mereka akan menambahkan gambar, karikatur, dan aksen lainnya untuk memperkuat gagasan dalam tulisan tersebut baik tanpa maupun melalui kebijakan dari redaktornya.

Entman menerangkan bahwa *framing* bahkan bisa menjadi sebuah paradigma sendiri. Ini dikarenakan proses dari praktik jurnalistik yang demikian. Ada pemilihan dan penonjolan isu sendiri yang akan diangkat oleh pihak redaksi dari media bersangkutan.

Model *framing* Entman, sebagaimana yang ia selalu tekankan dalam definisinya tentang framing adalah dilakukannya pengidentifikasian masalah (*problem identification*), mencari penyebab masalah (*causal interpretation*), membuat keputusan moral (*moral judgement*), dan solusi atas masalah (*treatment recommendation*).

Pada pendefinisian masalah akan dilihat bagaimana suatu masalah atau peristiwa dilihat. Satu masalah atau peristiwa akan dimaknai berbeda oleh wartawan yang berbeda. Itu dikarenakan skema individu yang berbeda, karena setiap individu memiliki perspektifnya masing-masing atas suatu masalah. Secara luas, pendefinisian masalah ini menyertakan, di dalamnya, konsepsi dan skema interpretasi wartawan (Eriyanto,



2012:189). Menurut Entman (1993) bahwa identifikasi masalah adalah mengidentifikasi apa yang dilakukan agen penyebab masalah dengan menggunakan istilah-istilah umum yang sesuai dengan nilai budaya setempat.

Memperkirakan penyebab masalah (*causal interpretation*) merupakan tahapan dimana peristiwa dilihat dari siapa atau apa yang menyebabkannya. Di sini, Entman menyebutkan bahwa *causal interpretation* adalah pengidentifikasian kekuatan yang menyebabkan masalah. Penyebab masalah tidak harus terpaku oleh apa, namun juga siapa aktor, yang dalam wacana tersebut dituding sebagai penyebab masalah. Dalam tahap ini, dapat terlihat bahwa ada yang dianggap sebagai pelaku dan juga ada yang dianggap sebagai korban.

Membuat pilihan moral (*make moral judgement*), tahapan ini adalah tahapan dimana terjadi evaluasi terhadap si penyebab masalah dan efek yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Ada penguatan argument dalam pendefinisian masalah. Artinya, ada argument lain yang menegaskan gagasan yang ingin disampaikan wartawan dan pihak redaksi. Gagasan yang dikutip berdasarkan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak (Eriyanto, 2012:191).

Elemen yang terakhir adalah solusi atas masalah atau *treatment recommendation*. Dengan tahapan ini, kita bisa mencari apa sebenarnya yang ditawarkan penulis sebagai solusi atas masalah yang diangkat sebagaimana yang ada di pengidentifikasian masalah. Apa yang menjadi

jalan keluar yang menunjukkan sikap wartawan atau redaksi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Keempat tahapan atau elemen di atas merupakan alat untuk memilah dan mengetahui framing yang dipakai media untuk mengemas suatu peristiwa atau berita. Eriyanto (2012:189) menyatakan tentang dua level *frame* berita yang timbul, yaitu bahwa *frame* berita timbul dalam dua level. *Pertama*, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. *Kedua*, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. *Frame* berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita.

Model *framing* Entman memang banyak berbicara tentang aksentasi yang menjadikan suatu wacana menonjol dan mendapat perhatian lebih. Seperti misalnya, penempatan berita menjadi headline yang berada di halaman muka surat kabar. Jenis font yang dicetak tebal dan besar. Belum lagi, penambahan foto, gambar, diagram, karikatur, dan lain-lain yang membuatnya menjadi menonjol sehingga menarik khalayak untuk membacanya.

Aksen-aksentasi tersebut merupakan penguatan yang dilakukan terhadap teks berita atau wacana. Kata menjadi senjata utama bagi para penulis dalam mengemas isu mereka. Oleh karenanya, dengan model framing Entman, pembedahan kata-kata tersebut akan lebih mudah teridentifikasi.

Kata memiliki kekuatan yang besar untuk memengaruhi cara memaknai teks oleh pembaca. Kata hanya mempunyai makna setelah ia diasosiasikan dengan referen. Artinya, ketika kita berbicara tentang denotasi, kita merujuk pada asosiasi primer yang dimiliki sebuah kata bagi kebanyakan anggota suatu masyarakat linguistik tertentu, sedangkan konotasi merujuk pada asosiasi sekunder yang dimiliki sebuah kata bagi seorang atau lebih anggota masyarakat itu (Tubbs & Moss, 2008:71).

Oleh karenanya, Entman memandang bahwa wacana merupakan arena pertarungan simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pokok persoalan wacana. Masing-masing pihak saling menonjolkan perspektif dan argumennya agar diterima khalayak. Setiap pihak juga menggunakan simbol, retorika, dan bahasa-bahasa tertentu dengan konotasi tertentu. Dengan kata lain, proses framing menjadikan media massa sebagai suatu arena di mana informasi tentang masalah-masalah tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak yang sama-sama menginginkan pandangannya didukung pembaca (Eriyanto, 2012:196). Inilah yang disebut Eriyanto dengan efek *framing*.

Namun Entman juga menyatakan bahwa sebuah kalimat bisa saja menunjukkan lebih dari satu dari empat elemen *framing*-nya, walaupun banyak kalimat dalam teks yang sama yang tidak menunjukkan satu pun dari keempat *framing* tersebut.

Dalam proses komunikasi, setidaknya ada empat lokasi yang menunjukkan suatu *framing*, yaitu komunikator, teks, si penerima, dan juga budaya. Komunikator berperan membuat suatu bingkai yang secara disadari maupun tidak menentukan apa yang ingin dikatakan dan menggiring dengan menggunakan *schemata* yang telah diorganisasikan. Teks yang terdiri atas potongan bingkai tersebut kemudian dikonstruksi dan ditonjolkan dengan menggunakan kata-kata kunci tertentu, frase, gambar, sumber informasi, atau apa pun yang bisa menggiring si pembaca ke arah bingkai yang dimaksud si komunikator. *Framing* pun kemudian diterima si pembaca yang sesuai dan diperkuat dengan nilai-nilai budaya dari suatu kelompok tersebut.

Cara *framing* bekerja adalah menonjolkan beberapa informasi dari teks. Kata penonjolan itu sendiri pun perlu diberi makna. Artinya, membuat potongan sebuah informasi itu lebih ditandai pembaca, lebih bermakna, dan juga lebih diingat pembaca. Sebuah teks bisa saja menjadi menonjol dengan penempatan-penempatan di kolom yang lebih besar, lebih mudah ditemukan, dan sebagainya. Atau teks tersebut selalu diulang untuk meninggalkan kesan yang kuat untuk diingat. Teks yang dianalisis *framing* dalam penelitian ini adalah teks atau naskah pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam KTT Arab Islam Amerika pada tahun 2017.

## B. Penelitian Terdahulu

Zahrotusti'anah (2011) melakukan penelitian tentang analisis *framing* tajuk rencana tentang konflik Indonesia-Malaysia di Harian Republika edisi Agustus 2010. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Harian Republika mengemas konflik Indonesia-Malaysia dalam tajuk rencananya selama bulan Agustus 2010? Penelitian ini berlandaskan pada paradigma konstruktivis dengan menggunakan riset kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data, penelitian ini menggunakan analisis *framing* Robert Entman yang membagi bingkai sebuah wacana ke dalam empat elemen; identifikasi masalah, penyebab masalah, evaluasi moral, dan penawaran solusi atas masalah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Republika mengemas kasus ini sebagai masalah komunikasi internasional yang melibatkan dua negara tetangga serumpun. Aktor penyebab masalah ada di Malaysia yang kerap kali tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Sikap saling menghormati dan menjaga hubungan baik keduanya merupakan solusi utama yang ditawarkan Republika atas kasus ini.

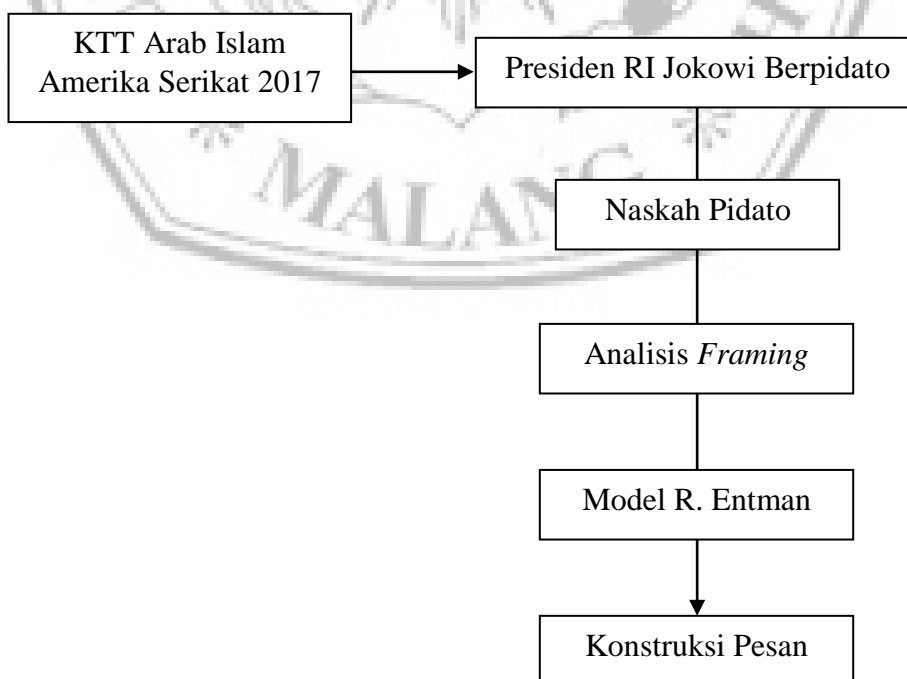
Penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam hal objek yang diteliti yaitu teks dan penggunaan analisis *framing* dengan model Robert N. Entman. Tetapi penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu juga memiliki beberapa perbedaan, terutama pada jenis teks yang dianalisis, komunikator atau narasumber teks, dan tema yang diusung. Jenis teks yang dianalisis pada penelitian terdahulu berupa teks

berita di surat kabar nasional, sedangkan penelitian sekarang berupa teks naskah pidato yang dibacakan seorang Presiden. Konstruksi yang dibangun dalam analisis *framing* pada penelitian terdahulu adalah kontruksi makna sedangkan penelitian sekarang berupa konstruksi citra. Komunikator atau narasumber pada penelitian terdahulu adalah wartawan penulis berita, sedangkan penelitian sekarang adalah Presiden RI Joko Widodo. Penelitian terdahulu mengusung tema konflik Indonesia-Malaysia, sedangkan penelitian sekarang bertema tentang terorisme dan radikalisme.

### C. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1, maka dapat dijelaskan bahwa pada hari Minggu, 21 Mei 2017, Arab Saudi menyelenggarakan *Arab Islamic America Summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab Islam Amerika di *Conference Hall King Abdulaziz Convention Center*, Riyadh, Arab Saudi. Presiden RI Joko Widodo terpilih menjadi salah satu pembicara dalam KTT yang dihadiri negara-negara Arab Islam dan Amerika Serikat tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo atas nama bangsa Indonesia memberikan pidato dengan naskah atau teks. Tema yang diusung dalam pidato tersebut adalah tentang terorisme dan radikalisme. Dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo menjadi narasumber yang membacakan pidato tentang terorisme dan radikalisme dalam KTT Arab Islam Amerika Serikat tersebut. Ucapan narasumber tersebut baik berupa kata, frase, maupun kalimat dituangkan dalam bentuk teks atau ditranskripsi oleh peneliti sebagai data atau objek yang akan diteliti. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing*, khususnya model *framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Model tersebut dipilih karena analisisnya bersifat tahapan sehingga dapat lebih mudah untuk melakukan pembedaan. Selain itu, model Entman juga cenderung bersifat solutif karena menyediakan rekomendasi solusi atas penyelesaian dari permasalahan yang telah teridentifikasi.

Analisis *framing* model Robert N. Entman dilakukan dengan empat cara atau tahapan. *Pertama*, identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai sesuatu yang mana positif dan yang mana negatif. *Kedua*, interpretasi penyebab masalah (*causal interpretation*), yaitu siapa yang dianggap

penyebab masalah. *Ketiga*, evaluasi moral (*moral evaluation*), yaitu penilaian atas penyebab masalah; *dan keempat*, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya. Berdasarkan kerangka hasil *framing* model Robert N. Entman maka dapat dibingkai pesan apa yang ingin dibangun oleh Presiden RI Joko Widodo melalui naskah pidatonya dalam KTT Arab Islam Amerika Serikat tahun 2017 kepada seluruh masyarakat internasional.

